



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No. 1 Kasongan Kabupaten Katingan - Kalimantan Tengah

Telp. (0536) 4043509, 4043510. Fax (0536) 4043508.

Website : portal.katingankab.go.id

Kasongan, 2 Juli 2025

Nomor : 700.1.2/51/SPI.KAT-INSP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eksp
Hal : Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak
Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas
(SPI) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas/Badan/Bagian (Terlampir),
di
Tempat

Menindaklanjuti Hasil Koreksi atas Rencana Aksi oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Surat Nomor : B/3978/KSP.00/70-74/06/2025 tanggal, 18 Juni 2025 Perihal Rapat Koordinasi Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dengan hal tersebut Rapat Koordinasi Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Hari, tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 di Ruang Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan perbaikan pada rencana aksi upaya pencegahan korupsi yang relevan dan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan korupsi atas Laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 Kabupaten Katingan.

Diminta agar Perangkat Daerah terkait mempelajari, melaksanakan dan/atau menyampaikan data dukung Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 sesuai dengan Matriks pada Area Perangkat Daerah masing-masing Dimensi dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab serta memperhatikan waktu penyelesaian.

Dokumen Tindak Lanjut atas pelaksanaan Rencana Aksi dimaksud disampaikan kepada PIC SPI Inspektorat Kabupaten Katingan, untuk disampaikan kepada KPK RI melalui aplikasi Jaga.id sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam rencana aksi.

Untuk itu disampaikan 1 (satu) eksemplar Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2024 dengan tujuan sebagai bahan tindaklanjut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pj. Sekretaris Daerah,

Deddy Ferras

Tembusan:

1. Bupati Katingan;
2. Wakil Bupati Katingan.

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Inspektorat
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
5	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Organisasi

**MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SPI 2024
KABUPATEN KATINGAN**

No	Dimensi	Rekomendasi	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Data Dukung	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan /Timeline	Risiko/Kendala Terkait
1	Pengelolaan Anggaran	Pedoman Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan Standard Honorarium	Menyusun Pedoman/Standard Pertanggungjawaban Penggunaan Perjadin dan Honorarium	Tersedianya Pedoman Standard Penggunaan Anggaran Perjadin dan Standard Honorarium	Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Perjadin dan Honorarium sesuai dengan ketentuan	Pedoman/Mekanisme /Standard/SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas/Honorarium Pemda	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Sekretariat Daerah Bagian Hukum 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Agustus	Risiko Penyalagunaan Anggaran
2	Pengelolaan Anggaran	Perbaikan Sistem Verifikasi Penggunaan Perjalanan Dinas dan Honorarium	Menyusun Pedoman/SOP Verifikasi oleh PPK-SKPD untuk lebih selektif dalam melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban Keuangan atas Perjadin dan Honorarium	Tersedianya Pedoman SOP sebagai dasar Verifikasi dan Pembayaran oleh PPK-SKPD	Kepatuhan atas Pelaksanaan Verifikasi pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan Perjadin dan Honorarium oleh PPK	Bukti Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Verifikasi oleh PPK-SKPD	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Sekretariat Daerah Bagian Hukum 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Juli	Risiko Penyalagunaan Anggaran
3	Pengelolaan Anggaran	Pelaksanaan Reviu/Audit Pertanggungjawaban Perjalanan Dhnas dan Honorarium	Melaksanakan Reviu/Audit Perjalanan Dinas dan Honorarium pada 5 OPD Anggaran terbesar	Pelaksanaan Reviu/Audit Perjadin dan Honorarium	Pelaksanaan Hasil Reviu/Audit Perjalanan Dinas / Honorarium	Laporan Hasil Reviu/Audit	Inspektorat	Oktober	Risiko Penyalagunaan Anggaran
4	Pengelolaan PBJ	Evaluasi Benturan kepentingan atas Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan Evaluasi Benturan Kepentingan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi proses pengadaan barang jasa	Pelaksanaan Evaluasi Benturan Kepentingan atas Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksana Evaluasi Benturan Kepentingan oleh Tim	Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan/Brg Jasa oleh PBJ/UJLP	1. Tim Etik 2. Tim Pokja UJLP/PSE 3. Pejabat Pengadaan	Juli	Risiko adanya Perdagangan Pengaruh dan Pemenangan Vendor tertentu atas pengadaan barang Jasa
5	Pengelolaan PBJ	Penyusunan Pedoman SSH,SBU,HSPK dan implementasi pada SIPD RI	Memastikan penyusunan Pedoman SSH,SBU dan HSPK secara Optimal melalui Reviu	Tersedianya Peraturan Kepala Daerah atas SSH, SBU, HSPK yang sudah di reviu	Penggunaan SSH, SBU dan HSPK pada SIPD maupun Proses Pengadaan Barang Jasa secara Optimal	Dokumen Perbup SHS Hasil reviu APJP	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. UJLP/PSE 3. Inspektorat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Agustus	Risiko kesalahan harga satuan dan memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan efektif dan efisien.
6	Pengelolaan PBJ	Transparansi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa oleh POKJA	Pemasangan Baner Sosialisasi Penolakan Gratifikasi dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa dan transparansi atas proses pengadaan barang/jasa/Penyangan Sirup update realtime, dan penerapan epurchasing	Pelaporan Gratifikasi pada UPG Penayangan SIRUP dan Penerapan Epurchasing	Jumlah laporan gratifikasi yang diterima dan ditindaklanjuti Laporan Penayangan SIRUP dan Penerapan epurchasing	Laporan Gratifikasi oleh UPG Laporan Realisasi /Rekapitulasi Hasil Pengadaan	1. Inspektorat 2. UJLP/PSE/Pokja/PPK	Juli	Proses pengadaan yang tidak transparan dapat menyebabkan menyebarkan ketidakadilan dan meningkatkan risiko gratifikasi.

7	Sosialisasi Antikorupsi	Sosialisasi Wistle Blowing Sistem	Penyediaan Perkada atas implementasi WBS Pemda dan Media saluran WBS berbasis elektronik	Pelaksanaan Sosialisasi WBS kepada seluruh ASN salahsatunya dalam perlindungan Pelapor	Tersedia Perkada Sarana Aplikasi WBS	Aplikasi WBS Online Laporan Sosialisasi WBS kepada ASN	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektorat 3. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Agustus	Organisasi mungkin kehilangan kepercayaan dari masyarakat atau stakeholders jika tidak menangani pelanggaran dengan efektif.
8	Sosialisasi Antikorupsi	Melaksanakan Sosialisasi penolakan Gratifikasi dan Penerapan Budaya Anti Korupsi	Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi dilingkungan Pemda Katingan	Semua pegawai memahami dan mematuhi kode etik	Pelaksanaan Hasil sosialisasi dan SPI	Laporan Sosialisasi budaya Anti Korupsi dan hasil SPI	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektorat 3. Penyuluh Anti Korupsi Sekretariat PAKSI	Agustus	Risiko korupsi dapat meningkat jika sosialisasi anti korupsi dan budaya anti korupsi tidak efektif.
9	Pengelolaan SDM	Prosedur /mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi serta penerapan sistem merit	Melaksana pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi serta penerapan sistem merit	Pelaksanaan Sistem Merit	1. Hasil SPI pada Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dinyatakan berada pada level rendah 2. Tersedia Perkada Pola Karir 3. Perkada TPP ASN 4. Pelaksanaan Sistem Merit 5. Nilai MCP Area Manajemen ASN	1. SK tentang Standar Kompetensi jabatan JPT Pratama 2. Laporan hasil Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit 3. Perbup TPP ASN Kabupaten Katingan	1. Sekretaris Daerah 2. Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah 4. Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Juni	Promosi/mutasi karena faktor hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almanater/golongan/organisasi/dst.

Kasongan, 1 Juli 2025

Pj. Sekretaris Daerah,



Deddy Ferras